



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN NGADA

TERHADAP

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024

-
- Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 - Salam sejahtera bagi kita semua,
 - Om Swastiastu
 - Namo Buddhaya,
 - Salam Kebajikan.
 - Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ngada
 - Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada
 - Yang terhormat Bapak-bapak wakil ketua serta bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Ngada
 - Bapak-ibu anggota Forkompimda Kabupaten Ngada
 - Bapak Sekretaris daerah Kabupaten Ngada
 - Bapak-bapak asisten Bupati Ngada
 - Bapak/ibu pimpinan perangkat daerah
 - Bapak ibu sekretaris dewan
 - Para tenaga Ahli fraksi dan sekretaris pimpinan
 - Para wartawan, media massa dan hadirin serta segenap warga masyarakat kabupaten Ngada yang fraksi Golkar banggakan.

Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas perkenan dan penyelenggaraan-Nya, kita diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di ruangan yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal' afiat, dalam rangka pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Bapak Bupati dan wakil Bupati, Bapak Ketua, Bapak - Bapak Wakil Ketua dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Ngada atas penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami menilai bahwa dokumen ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Secara khusus, Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa unsur dalam dokumen pertanggungjaaban APBD 2024 yang menjadi catatan dari kami diantaranya:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai inti dari pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dalam kaitan itu, berikut pendapat dan apresiasi kami:

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:** Fraksi Golkar mencatat adanya realisasi pendapatan dari sektor ini sebesar 151 juta rupiah atau 303% dari target awal sebesar 50 juta rupiah. Hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk peningkatan capaian PAD yang signifikan, terutama dari Lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, realisasi retribusi hanya 38,67% menunjukkan perlunya

perbaikan tata kelola layanan publik di sektor ini, agar penerimaan negara tidak hanya bergantung pada sumber yang sama setiap tahunnya.

2. **Dinas Kesehatan:** Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran yang melampaui target (108,28%). Ini membuktikan efektivitas pelaksanaan program kesehatan yang semakin optimal, termasuk peningkatan PAD dari retribusi daerah dan layanan kesehatan. Namun, tetap kami mendorong penguatan sistem layanan kesehatan berbasis desa serta peningkatan kualitas SDM kesehatan.
3. **RSUD Bajawa:** Realisasi pendapatan RSUD Bajawa mencapai 112,75% dari target, yang menjadi indikator nyata bahwa rumah sakit daerah kita mampu mengelola layanan secara profesional dan produktif. Fraksi Golkar mendorong agar pendapatan ini diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan, fasilitas kesehatan, serta sistem manajemen yang semakin transparan.
4. **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan:** Capaian realisasi baru mencapai 48,75% menunjukkan perlunya evaluasi mendalam, terutama dalam hal retribusi dan efisiensi pengelolaan infrastruktur dasar. Fraksi Golkar menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan jalan lingkungan dan perumahan rakyat sebagai faktor pendukung utama pelayanan dasar lainnya.
5. **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:** Fraksi Golkar mengapresiasi upaya penegakan Perda dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan respon penanganan kebakaran dan ketertiban umum. Kami mendorong peningkatan kapasitas personel serta kelengkapan sarana dan prasarana yang masih menjadi tantangan.
6. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):** Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat dan kesiapsiagaan BPBD dalam penanganan bencana di Kabupaten Ngada. Diharapkan ke depan, sinergi lintas sektor dan optimalisasi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan untuk memperkuat sistem mitigasi dan edukasi masyarakat.

7. Dinas Sosial: Realisasi program-program perlindungan sosial telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat rentan. Fraksi Golkar mendorong peningkatan akurasi data penerima bantuan serta kolaborasi dengan desa untuk memperluas jangkauan program yang berbasis keadilan sosial.

Dengan memperhatikan capaian dan tantangan di atas, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya **evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan data yang valid, serta komitmen pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.** Pemerintah Daerah diharapkan terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Ngada.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan penghargaan atas kerja keras seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, khususnya dalam bidang urusan wajib non-pelayanan dasar yang tidak kalah pentingnya dalam memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.

Adapun catatan dan apresiasi Fraksi Golkar terhadap pelaksanaan urusan ini sebagai berikut:

- 1. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja:** Fraksi Golkar mengapresiasi langkah-langkah penguatan kapasitas tenaga kerja lokal serta dukungan terhadap penempatan kerja dan pelatihan. Diharapkan ke depan, dinas ini mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja berbasis potensi unggulan daerah.
- 2. Dinas Lingkungan Hidup:** Meskipun realisasi anggaran masih rendah, kami memberikan apresiasi atas komitmen penguatan kesadaran lingkungan melalui kegiatan edukasi dan pengawasan. Ke depan, Fraksi Golkar berharap program

perlindungan sumber daya alam dapat ditingkatkan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Kami mengapresiasi inovasi layanan kependudukan yang semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan Fraksi Golkar tetap penuh terhadap penguatan sistem digitalisasi data kependudukan untuk pelayanan yang cepat dan akurat.
4. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:** Fraksi Golkar mengapresiasi dukungan dinas terhadap penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kolaborasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan.
5. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:** Fraksi Golkar memberikan penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan edukasi kependudukan. Kami mendorong peningkatan sinergi dengan sektor pendidikan dan kesehatan dalam mengintegrasikan program KB berbasis komunitas.
6. **Dinas Perhubungan:**Fraksi Golkar mencermati perlunya peningkatan kualitas dan cakupan transportasi umum serta infrastruktur perhubungan. Meski realisasi masih rendah, kami menghargai usaha yang telah dilakukan dan mendorong percepatan serta perbaikan ke depan.
7. **Dinas Komunikasi dan Informatika:** Fraksi Golkar mengapresiasi peran strategis dinas ini dalam mendorong keterbukaan informasi dan transformasi digital pemerintahan. Akses komunikasi di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian utama yang harus ditindaklanjuti.
8. **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:** Kami mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Diharapkan insentif dan fasilitasi pelatihan serta akses pembiayaan dapat diperluas demi penguatan ekonomi rakyat.

9. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:** Fraksi Golkar mendukung segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan birokrasi pelayanan perizinan yang efisien. Pelayanan berbasis digital dan transparansi harus menjadi prioritas.
10. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga:** Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas semangat membangun karakter generasi muda melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga. Ke depan, kami mendorong peningkatan sarana prasarana serta pembinaan atlet berbakat di tingkat desa hingga kabupaten.
11. **Dinas Kearsipan:** Kami menghargai upaya penataan arsip dan dokumentasi pemerintahan sebagai bagian penting dari tata kelola birokrasi modern. Fraksi Golkar mendorong akselerasi digitalisasi arsip dan sistem pelayanan informasi publik yang terintegrasi.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa **urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar** memiliki peran vital dalam menunjang fungsi pelayanan utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi program lintas sektor agar pencapaian kinerja pemerintahan semakin solid dan berkelanjutan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa urusan pemerintahan pilihan adalah manifestasi dari otonomi daerah yang menyentuh langsung sektor-sektor unggulan lokal. Urusan ini mencerminkan karakteristik, potensi, dan daya saing daerah yang perlu terus dikembangkan secara serius dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan beberapa catatan sebagai berikut:

1. **Dinas Perikanan:** Fraksi Golkar mengapresiasi langkah dinas dalam upaya menjaga produktivitas sektor perikanan meski anggaran yang tersedia

relatif kecil. Realisasi anggaran yang cukup optimal menunjukkan komitmen dalam mendukung nelayan lokal dan pengembangan perikanan tangkap serta budidaya. Namun, kami mendorong adanya peningkatan program pendampingan dan akses permodalan bagi kelompok nelayan, serta penguatan rantai pemasaran hasil perikanan.

2. **Dinas Pariwisata:** Fraksi Golkar memberikan penghargaan atas pelaksanaan program pariwisata yang berkontribusi dalam promosi destinasi unggulan daerah, meskipun realisasi belum maksimal (sekitar 69%). Kami menilai perlu adanya penajaman strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan kelestarian alam, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan penguatan SDM pariwisata.
3. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:** Apresiasi kami sampaikan atas komitmen dinas dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Namun realisasi anggaran yang masih rendah (sekitar 16%) menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi terhadap desain program, efektivitas pelaksanaan, serta hambatan teknis yang terjadi di lapangan. Fraksi Golkar mendorong percepatan realisasi program dan pendekatan partisipatif bersama petani guna memastikan keberlanjutan hasil.
4. **Dinas Peternakan:** Fraksi Golkar mencatat adanya capaian realisasi lebih dari 100% di dinas ini (sekitar 116%). Hal ini patut diapresiasi karena mencerminkan manajemen yang responsif dan program yang disambut baik oleh masyarakat. Ke depan, kami mendorong diversifikasi produk peternakan serta dukungan pasar dan teknologi untuk meningkatkan daya saing peternak lokal.
5. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan:** Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas konsistensi pelaksanaan program dinas ini dalam mendorong industri kecil dan perdagangan lokal. Kendati skala program masih terbatas, kami berharap adanya penguatan program hilirisasi produk lokal, fasilitasi

legalitas usaha, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro di pasar rakyat dan sentra industri desa.

Fraksi Partai Golkar menilai bahwa **urusan pemerintahan pilihan** bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi, namun merupakan pilar penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong:

- ❖ **Sinergitas lintas OPD** dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
- ❖ **Optimalisasi anggaran** yang berpihak pada sektor produktif;
- ❖ **Peningkatan partisipasi masyarakat** melalui kemitraan strategis;
- ❖ **Digitalisasi layanan dan promosi** untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa unsur pendukung urusan pemerintahan, khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, memegang peranan strategis dalam menjamin kelancaran tata kelola pemerintahan dan pelayanan kelembagaan. Keduanya menjadi motor koordinatif dalam menjembatani komunikasi antara kebijakan, pelaksanaan teknis, dan fungsi pengawasan.

Adapun pandangan dan masukan kami sebagai berikut:

1. **Sekretariat Daerah (Setda)**: Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja Setda yang telah menjalankan peran koordinatif lintas OPD dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah secara teknokratis. Realisasi anggaran pada unit ini menunjukkan tingkat akurasi perencanaan dan kemampuan serapan yang relatif baik. Namun, kami mendorong agar fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada perangkat daerah semakin

ditingkatkan agar program-program strategis daerah dapat berjalan lebih sinergis dan efektif.

Kami juga mendorong:

- ❖ Optimalisasi peran Setda dalam penguatan reformasi birokrasi.
- ❖ Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan berbasis digital.
- ❖ Evaluasi rutin terhadap sistem perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

2. **Sekretariat DPRD:** Fraksi Golkar mengapresiasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD yang telah mendukung kelancaran kegiatan kelembagaan DPRD, baik dari aspek administrasi, persidangan, hingga fasilitasi kegiatan kedewanan. Fungsi ini sangat penting dalam memperkuat posisi DPRD sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah daerah.

Meskipun demikian, kami mendorong agar:

- ❖ Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD lebih difokuskan pada substansi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- ❖ Setwan memperkuat peran dalam dokumentasi, publikasi dan transparansi kinerja DPRD kepada masyarakat.
- ❖ Penggunaan anggaran diarahkan lebih optimal untuk memperkuat profesionalitas dan etika kelembagaan DPRD.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya unsur pendukungnya. Oleh sebab itu, kami mendorong agar kedua lembaga ini tetap menjaga integritas, efisiensi anggaran, serta profesionalitas dalam mendukung pelayanan publik yang prima dan akuntabel.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh unsur-unsur penunjang yang bersifat strategis dan sistemik. Empat badan teknis dalam kategori ini menjadi tulang punggung dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Berikut pandangan dan masukan kami:

1. **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang):** Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bapelitbang yang telah memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah secara terukur dan partisipatif. Kami mencatat bahwa dokumen perencanaan daerah semakin sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional. Namun, kami mendorong agar:
 - ❖ Fungsi litbang diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga akademik dan komunitas riset lokal.
 - ❖ Evaluasi program dilaksanakan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
 - ❖ Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) lebih dioptimalkan dalam pengambilan kebijakan.
2. **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD):** Kami memberikan penghargaan atas keberhasilan BKAD dalam menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan anggaran daerah secara profesional. Fraksi Golkar mencermati bahwa pengelolaan aset daerah masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi penataan, legalitas, maupun pemanfaatan. Oleh karena itu, kami mendorong:
 - ❖ Penyusunan neraca aset yang akurat dan terdokumentasi dengan baik.
 - ❖ Peningkatan pengawasan penggunaan anggaran di seluruh OPD.

- ❖ Digitalisasi sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan yang terintegrasi.
3. **Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)**: Fraksi Golkar mencatat bahwa kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami mendukung langkah Bapenda dalam memperluas basis pajak dan retribusi daerah, serta mendorong:
- ❖ Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan pendekatan teknologi.
 - ❖ Sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak.
 - ❖ Optimalisasi potensi lokal seperti sektor wisata, UMKM, dan perdagangan sebagai sumber PAD baru.
4. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**: Kami mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan manajemen ASN. Fraksi Golkar menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengembangan karier, dan oleh sebab itu kami mendorong:
- ❖ Penataan sistem promosi dan mutasi berbasis kinerja dan kompetensi.
 - ❖ Integrasi sistem informasi kepegawaian yang transparan.
 - ❖ Pelaksanaan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang berkelanjutan bagi ASN muda.

Fraksi Partai Golkar menilai bahwa unsur penunjang bukan hanya pelengkap struktur pemerintahan, tetapi merupakan **penentu kualitas tata kelola birokrasi**. Karena itu, perencanaan yang baik, keuangan yang tertib, pendapatan yang sehat, dan SDM yang kompeten harus terus ditumbuhkan secara sinergis dan berkelanjutan.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang akuntabel dan bersih. Dalam hal ini, keberadaan **Inspektorat Daerah** sebagai unsur pengawasan internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Inspektorat Daerah yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, audit internal, serta pendampingan terhadap perangkat daerah. Beberapa catatan dan masukan kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Penguatan Fungsi Pengawasan Preventif:** Fraksi Golkar mendorong agar Inspektorat lebih mengedepankan pola pengawasan berbasis pencegahan (preventif) daripada hanya bersifat korektif setelah terjadi penyimpangan. Upaya ini dapat dilakukan melalui:
 - ❖ Sosialisasi rutin tentang regulasi pengelolaan keuangan dan program kegiatan.
 - ❖ Pendampingan intensif bagi OPD yang memiliki kerentanan pengelolaan anggaran.
2. **Optimalisasi Audit Kinerja dan Tematik:** Selain audit keuangan, kami mendorong peningkatan kualitas audit kinerja untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Audit tematik terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perlu ditingkatkan.
3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan:** Fraksi Golkar berharap Inspektorat terus memperkuat pengawasan berbasis digital dengan mengintegrasikan sistem pelaporan dan monitoring yang real-time. Langkah

ini akan mempercepat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi kerja auditor.

4. **Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan BPK:** Kami mendorong Inspektorat untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti BPK dan aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang holistik dan saling mendukung dalam mencegah serta menindak penyalahgunaan anggaran daerah.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa keberadaan Inspektorat yang kuat dan independen merupakan penopang utama dari sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada.

G. Unsur Kewilayahan

Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada level kecamatan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah administratif di Kabupaten Ngada. Unsur kewilayahan mencerminkan pendekatan pembangunan yang terdesentralisasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Adapun pendapat dan masukan kami terhadap pelaksanaan unsur kewilayahan sebagai berikut:

1. **Pemerataan dan Keadilan Anggaran Antar Kecamatan:** Fraksi Golkar mencermati bahwa penyebaran anggaran dan program masih belum sepenuhnya merata antar kecamatan. Oleh karena itu, kami mendorong agar ke depan, kebijakan penganggaran berbasis kebutuhan dan potensi lokal menjadi prinsip utama dalam penyusunan program di tingkat kecamatan.

2. **Kecamatan sebagai Garda Terdepan Pelayanan Publik:** Kami menekankan pentingnya penguatan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi pembangunan di tingkat desa. Hal ini memerlukan:
 - o Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
 - o Dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
 - o Digitalisasi layanan publik di kantor kecamatan secara bertahap.
3. **Percepatan Pembangunan Wilayah Terpencil dan Perbatasan:** Fraksi Golkar secara khusus memberikan perhatian kepada kecamatan yang tergolong terpencil atau terluar seperti Riung, Riung Barat, Soa, dan Inerie. Kami mendorong agar akses jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi menjadi prioritas untuk mengejar ketertinggalan wilayah.
4. **Optimalisasi Musrenbang Kecamatan:** Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan harus dijadikan ruang efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat secara terbuka dan berjenjang. Kami mendorong peningkatan kualitas perencanaan partisipatif agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan berbasis data.
5. **Peran Camat sebagai Koordinator Pembangunan Wilayah:** Fraksi Golkar menilai bahwa peran camat bukan hanya sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, perlu diberikan kewenangan yang memadai serta dukungan anggaran operasional yang proporsional.

Dengan memperhatikan hal di atas, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pembangunan berbasis wilayah adalah wujud dari semangat otonomi daerah yang sesungguhnya. Pemerintah Daerah harus terus mendorong efektivitas pelaksanaan program hingga ke level kecamatan demi tercapainya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)** yang telah melaksanakan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik, ketahanan ideologi, serta fasilitasi kehidupan demokrasi di Kabupaten Ngada.

Fungsi Kesbangpol tidak hanya administratif, tetapi juga strategis sebagai penjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal. Oleh karena itu, Fraksi Golkar memberikan pandangan dan masukan sebagai berikut:

1. **Penguatan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:** Fraksi Golkar mendukung program-program yang membangun pemahaman ideologi Pancasila, semangat kebhinekaan, dan integrasi nasional di tengah masyarakat. Pendidikan politik bagi pemuda, pelajar, tokoh masyarakat, serta ASN perlu terus digalakkan sebagai benteng terhadap radikalisme dan intoleransi.
2. **Fasilitasi Kehidupan Politik yang Demokratis dan Tertib:** Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilu serentak, Fraksi Golkar mengapresiasi peran Kesbangpol dalam menjaga suasana politik yang kondusif. Kami mendorong:
 - ❖ Peningkatan komunikasi antar unsur partai politik dan ormas.
 - ❖ Pembinaan kelembagaan partai politik secara adil dan proporsional.
 - ❖ Pendataan dan pembinaan ormas agar lebih tertib dan produktif.
3. **Peran Strategis dalam Pencegahan Konflik Sosial:** Dalam konteks daerah yang majemuk, Kesbangpol berperan penting dalam memetakan potensi konflik serta membangun sistem deteksi dini dan penanganan secara preventif. Fraksi Golkar mendorong penguatan forum-forum komunikasi masyarakat lintas agama, budaya, dan generasi untuk memperkuat kohesi sosial.
4. **Sinergi dengan Aparat Keamanan dan Pemerintah Desa:** Kesbangpol perlu terus meningkatkan sinergi dengan TNI, POLRI, serta perangkat desa dan

kelurahan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah serta menanggulangi potensi gangguan sosial-politik.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa unsur pemerintahan umum, khususnya Badan Kesbangpol, harus terus diperkuat baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun anggaran. Sebab tanpa stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, seluruh agenda pembangunan akan terhambat.

Bapak Bupati dan wakil Bupati, Bapak Ketua, Bapak – Bapak Wakil Ketua dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Terhadap Rekapitulasi dan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024, dalam pandangan kami perlu disampaikan beberapa pendapat terkait dokumen APBD 2024 ini diantaranya:

1. Apresiasi terhadap Capaian Makro Anggaran

Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi belanja daerah sebesar **Rp1,015 triliun atau 92,12% dari total anggaran Rp1,102 triliun**. Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang cukup disiplin dan efisien secara umum. Kami juga mencatat adanya kenaikan pendapatan operasional sebesar **Rp920,4 miliar**, meningkat 24% dari tahun sebelumnya.

2. Catatan Kritis atas Struktur dan Pola Belanja

Namun demikian, kami memberikan **kritik terhadap pola belanja** yang masih dominan pada belanja operasi (60%) dibanding belanja modal (20%). Ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan infrastruktur atau barang yang memiliki nilai tambah jangka

panjang masih kurang menjadi prioritas. Kami mendorong perubahan proporsi ini ke depan agar lebih berpihak pada sektor produktif.

3. Perlu Ketelitian atas Koreksi Ekuitas dan Kesalahan Pembukuan

Fraksi Golkar mencermati adanya koreksi ekuitas yang signifikan senilai **Rp9,17 miliar**, yang berasal dari kesalahan pencatatan kas, aset, piutang, hingga kewajiban. Ini menjadi sinyal bahwa tata kelola akuntansi belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pencatatan aset dan penyesuaian nilai ekuitas.

- Koreksi besar terhadap **aset lain-lain** Dinas Perhubungan yang mencapai lebih dari **Rp9 miliar**, serta koreksi **utang jangka pendek** pada RSUD Bajawa sebesar **Rp79 juta**, patut menjadi perhatian khusus karena bisa berpengaruh pada validitas neraca daerah.

4. SILPA dan Saldo Anggaran Lebih yang Menurun

Kami juga mencermati **penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL)** dari **Rp101,6 miliar** menjadi **Rp80,2 miliar**, dan **SILPA akhir** sebesar **Rp79,7 miliar**. Ini menandakan adanya penurunan fleksibilitas fiskal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan tahun berjalan agar tidak mengganggu cashflow pembangunan.

5. Transparansi atas Aset dan Investasi Daerah

Kami memberi perhatian terhadap daftar aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, hingga penyertaan modal yang tercantum. Perlu audit dan transparansi lanjutan atas **investasi daerah dan dana bergulir**, mengingat belum semua investasi memberikan dividen atau dampak ekonomi yang terukur kepada daerah.

6. Rekomendasi dan Dorongan Fraksi Golkar

- **Evaluasi menyeluruh** terhadap manajemen aset, piutang dan investasi agar koreksi tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.
- **Peningkatan akurasi perencanaan anggaran dan target realisasi belanja**, terutama pada belanja modal dan kegiatan strategis.
- **Optimalisasi penggunaan SILPA dan SAL** untuk program prioritas, bukan hanya sebagai dana sisa tanpa strategi pemanfaatan.
- **Peningkatan kapasitas SDM keuangan daerah**, termasuk pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi dalam pelaporan.

PENUTUP

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kami menilai bahwa secara umum, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan kritis, baik pada aspek perencanaan, efektivitas belanja, ketepatan realisasi, maupun pengelolaan aset dan investasi daerah yang perlu mendapat perhatian serius di tahun-tahun mendatang.

Melalui pandangan umum ini, Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya Kabupaten Ngada yang maju, adil, dan berkelanjutan.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan, dengan harapan dapat menjadi kontribusi konstruktif bagi penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian dan terima kasih.

Hidup Rakyat!...Hidup Demokrasi!... Golkar... Jaya!

Bajawa, 11 Juli 2025

Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ATANASIVS H. WATUNGADHA	KETUA	
2	ANTONIUS NO GILI, S. Pd	WAKIL KETUA	
3	ALEXANDER Y. SONGKARES, S. Ip	SEKRETARIS	
4	ROMILUS JUJI, ST	ANGGOTA	
5	AURELIUS ROPA, S. Sos	ANGGOTA	

